

# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023**



**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN DAIRI**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan tahapan yang sangat penting dilaksanakan setiap SKPD untuk mengarahkan tujuan serta sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Renja Dinas Sosial Kabupten Dairi Tahun 2023 ini berisikan Tujuan, sasaran serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan untuk penyempurnaan sehingga akhirnya Renja yang akan tersusun dapat menjawab permasalahan baik permasalahan pada Dinas Sosial Kabupaten Dairi maupun permasalahan daerah secara keseluruhan.

Atas tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Dairi ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Dairi yang telah banyak memberikan bantuan dan semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidikalang,

2022

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN DAIRI,**  
ANGGARA RAMCES SINURAT, ST  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19770323 2003 12 1 005

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tahun 2023 mengacu pada RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2023, Renstra Dinas Sosial Tahun 2019 - 2024, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Renja mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Dairi
3. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Daerah
4. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

## 1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja Dinas Sosial Kabupaten Dairi tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tahun 2023. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Dairi yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023;
2. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Sosial berdasarkan Renstra;
3. Menjadikan Renja sebagai dokumen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun ;
4. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Sosial;
5. Menyediakan informasi tentang indikator kinerja Sosial Kabupaten Dairi yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2023.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Kerja Dinas Sosial sebagai berikut :

- BAB I   Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hukuman dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika.
- BAB II   Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Sosial Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Sosial, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, dan penelaahan usulan program masyarakat.
- BAB III   Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial, program dan kegiatan dari Dinas Sosial.
- BAB IV   Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB V   Penutup, menguraikan kesimpulan dari tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Sosial Tahun 2023.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021**

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2021 melalui analisis terhadap kinerja output dan kinerja keuangan. Pencapaian kinerja output akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, sedangkan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

Realisasi penggunaan anggaran tersebut s/d akhir tahun anggaran 2021 adalah 72,49% atau Rp. 7.256.416.630 dengan realisasi sebesar Rp. 4.919.164.933,-

Jumlah PPKS yang menerima layanan adalah :

- Keluarga miskin : 19.204 KK
- Penerima PBI -JKN KIS : 107. 025 Orang
- Penyandang disabilitas : 137 KK
- Anak terlantar : 1 Orang
- Lanjut usia : 100 Orang
- Anak yang berhadapan dengan hukum : 11 Orang
- Korban Bencana alam dan non alam : 1037 Orang

Adapun jumlah PSKS yang diberdayakan adalah :

- TAGANA : 37 orang
- TKSK : 15 orang
- PKH : 37 orang

**Tabel 2.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2021**  
**Kabupaten Dairi**

Nama SKPD : Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-SKPD) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target RENJA - SKPD Tahun 2021	Realisasi RENJA-SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota</b>									
	Kegiatan :  Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Sub Kegiatan:  Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok		1 Dok	1 Dok	100	0	0	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	21 laporan		7 laporan	7 laporan	100	7 laporan	14 laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-SKPD) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target RENJA - SKPD Tahun 2021	Realisasi RENJA-SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Ikhtisar Realisasi Kinaerja SKPD								
	<b>Kegiatan:</b>									
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
	<b>Sub kegiatan:</b>									
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	45 paket	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	36 Bln	0
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	254 paket	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	36 Bln	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	24 paket	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	36 Bln	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-SKPD) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target RENJA - SKPD Tahun 2021	Realisasi RENJA-SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	504 dok	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	36 Bln	0
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	630 laporan	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	36 Bln	0
	<b>Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 unit		10 Unit	9 Unit	90	0	9 Unit	
	<b>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-SKPD) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target RENJA - SKPD Tahun 2021	Realisasi RENJA-SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Sub Kegiatan:</b>									
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	36 Bln	0
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	81 laporan	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	36 Bln	0
	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	18 laporan	6 Orang	6 Org	6 Org	100	6 Org	18 Org	40
	<b>Kegiatan:</b> <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	9 unit	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	36 Bln	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-SKPD) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target RENJA - SKPD Tahun 2021	Realisasi RENJA-SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya								
	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 unit	12 Bln	12 Bln	12 bln	100	12 Bln	36 Bln	0
	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>									
	<b>Kegiatan:</b>									
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota</b>									
	<b>Sub Kegiatan:</b>									
	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	45 orang		12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	24 Bln	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-SKPD) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target RENJA - SKPD Tahun 2021	Realisasi RENJA-SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	150 keluarga		100 Org	100 Org	100 Org	0	100 Org	0
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	45 lembaga		15 KT	15KT	100	15 KT	30 KT	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/kota	90 sertifikat		15 kec	15 kec	100	0	15 Kec	
	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>									
	<b>Kegiatan:</b> <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,</b>									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-SKPD) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target RENJA - SKPD Tahun 2021	Realisasi RENJA-SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial</b>									
	<b>Sub Kegiatan:</b>									
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	75 orang	-	55 Org	55 Org	100	55 Org	110 Org	0
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	300 orang		100 Org	100 Org	100	100 Org	200 Org	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	60 orang		42 Org	22 Org	52	18 Org	40 Org	
	<b>Program Perlindungan Dan</b>									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-SKPD) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target RENJA - SKPD Tahun 2021	Realisasi RENJA-SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Jaminan Sosial</b>									
	<b>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>									
	<b>Sub Kegiatan:</b>									
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	390.567 keluarga		169 Desa/ Kel	169 Desa/Kel	100%	16.525 Org		
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	1.964 keluarga	-	12 Bln	12 Bln	100	750 Keluarga	0	0
	<b>Program Penanganan Bencana</b>									
	<b>Kegiatan:</b>									
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-SKPD) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target RENJA - SKPD Tahun 2021	Realisasi RENJA-SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Kabupaten/ Kota</b>									
	Sub Kegiatan:									
	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	200 orang		12 Bln	12 Bln	100	0	0	0
	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan Pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten/kota	200 orang	-	12 Bln	12 Bln	100	0	0	0
	<b>Kegiatan:</b> <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana</b>			-						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA-SKPD) Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA-SKPD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA-SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target RENJA - SKPD Tahun 2021	Realisasi RENJA-SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Kabupaten/Kota</b>									
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	66 orang	12 bln	12 Bln	12 Bln	100	12 bln	36 bln	0

Sidikalang, 2022  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN DAIRI

Anggara Ramces Sinurat, ST  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770323 200312 1 005

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Dinas sosial Kabupaten Dairi diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran atau yang disebut dengan Indikator kinerja utama (IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi target sasaran pelayanan adalah:

- Anak yang berhadapan dengan hukum
- Penyandang disabilitas
- Anak terlantar
- Gelandangan dan pengemis
- Wanita rawan sosial ekonomi
- Lanjut usia terlantar
- Korban Bencana Alam
- Korban Bencana Sosial
- Fakir Miskin
- Komunitas Adat Terpencil
- Pemulung

Sedangkan PSKS yang menjadi target sasaran pemberdayaan adalah :

- Tagana
- TKSK
- PKH

Tabel 2.10.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Dairi

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I	Urusan Sosial													
1	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM)/Puskessos yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial			5%	5%	5%	5%	5%	0	0	5%	5%	5%	
2	Jumlah panti sosial/rumah singgah/rumah bersama yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	0	0	1 unit	1 unit	1 unit	
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan			5.50%	5.80%	6.00%	6.20%	6.50%	47,90%	35.96	6.00%	6.20%	6.50%	
4	Persentase meningkatnya akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat KAT			10%	20%	25%	30%	35%	0	0	25%	30%	35%	
5	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti			100%	100%	100%	100%	100%	11%	14.42%	100%	100%	100%	
6	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti			100%	100%	100%	100%	100%	24%	67.47%	100%	100%	100%	
7	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti			100%	100%	100%	100%	100%	88%	64.39%	100%	100%	100%	

8	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Kabupaten Dairi

1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti			
	Outcome	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	665	22,16%
		Populasi Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	3.000	
	Output	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	98
		3	Jumlah Tim Reaksi cepat yang dibentuk	-
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang dijangkau	665
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	454
		7	Jumlah rumah singgah / shelter / tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	-
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang menerima paket sandang	75
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang memanfaatkan alat bantu	82
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah / shelter	-
		11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	-
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	-
		13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	-
		14	Jumlah pekerja sosial professional dan / atau TKS dan / atau relawan sosial yang disediakan	94

	15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinas sosial, rumah singgah / shelter dan / atau pusat kesejahteraan sosial	-
	16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	100
	17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	25
	18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0
	19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	-
	20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	-
	21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	6
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten\kota		
outcome	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran		1.037 jiwa
	Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten\kota yang membutuhkan perlindungan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota		1.037 jiwa
	1	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	1.037 jiwa
	2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	143 KK
	3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0
	4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0
	5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0
	6	Jumlah pekerja sosial profesional /tenaga kesejahteraan sosial dan/ relawan sosial yang tersedia	1.180 orang

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kabupaten Dairi

NO	Jenis pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Target Pencapaian	Realisasi	Dukungan personil	Alokasi anggaran (RP)	Permasalahan	Solusi	OPD pelaksana
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	14,42%	17 orang	175.467.400.-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum semua PPKS dapat tertangani</li> <li>- Sarana dan prasarana belum memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan PPKS</li> <li>- Mengusulkan ketersediaan sarana dan prasarana</li> </ul>	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	100%	67,47%	17 orang	111.864.500.-	Kurangnya Pedidikan dan Pelatihan dalam pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial	Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS maupun SDM Kesejahteraan Sosial untuk peningkatan SDM	Dinas Sosial
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	95,81%	17 orang	69.549.400.-	Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial

								(PPKS)	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	17 orang	0	Kurangnya kerjasama antara Dinas Sosial dengan Instansi terkait seperti Kementrian, Balai, Balai Besar, Dunia Usaha/ CSR dalam peningkatan pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan peran aktif instansi terkait dalam penyelenggaraan kesejahteraan	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.	100%	100%	17 orang	49.995.000.-	Kurangnya penyediaan mobilitas darat pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Perlunya mobil rescue untuk mobilitas darat pada saat penyaluran bantuan pada saat tanggap dan pasca bencana	Dinas Sosial

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan RPJMD 2019-2024, visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah “mewujudkan Dairi unggul yang menyejahterakan masyarakat dalam harmoni keberagaman”. Untuk mewujudkan visi, dirumuskan misi pembangunan daerah tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.
2. Membangun kualitas sumber daya masyarakat Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing.
3. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sector KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Daerah.
4. Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informatika.

Terkait dengan peran Dinas Sosial Kabupaten Dairi terhadap pencapaian program nasional dan pencapaian visi dan misi kepala daerah adalah seperti table di bawah ini :

#### Pencapaian Program Nasional Dan Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah

No	Indikator Capaian Program Prioritas K/L	Misi Bupati	Program/Kegiatan PD
1	Jumlah laporan pelaksanaan subsidi pangan (Rastra) selama 12 bulan (dokumen)	Membangun kualitas sumber daya masyarakat Dairi yang	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

		cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing	
2	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (KK)	Membangun kualitas sumber daya masyarakat Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Tantangan yang dihadapi Dinas sosial dalam mengembangkan pelayanannya, yaitu :

1. Minimnya pengetahuan dan wawasan aparatur dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS
2. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang sosial
3. Kurang tersedianya data yang valid
4. Kurangnya sarana prasarana penunjang kantor.
5. Masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Dairi.

Peluang yang dapat diidentifikasi Dinas Sosial Kabupaten Dairi adalah:

1. Peningkatan pengelolaan Program kesejahteraan sosial
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial

Isu – isu strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan adalah :

- a. Lemahnya kemampuan sumber daya manusia aparatur Dinas Sosial dalam penanganan bidang sosial
- b. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Sosial
- c. Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya sumber daya baik aparatur maupun sarana prasarana yang tersedia
- d. Dukungan anggaran APBD bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial belum memadai di banding dengan jumlah PPKS yang ada

- e. Lemahnya koordinasi dengan lintas SKPD, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Masyarakat, dan lain-lain.

## 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Tabel 2.4.  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Dairi

Nama SKPD : Dinas Sosial

No Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kabupaten /Kota</b>	<b>Dinas Sosial</b>				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kabupaten /Kota</b>					
<b>1.06.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat</b>					<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat</b>					

1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Sosial	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Sosial	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Laporan	10.000.000	
<b>1.06.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang/bulan	2.417.042.989	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang/bulan	2.417.042.989	
<b>1.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
1.06.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan	Dinas Sosial	Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	20.000.000	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan	Dinas Sosial	Jumlah paket komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	11.082.500	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	85.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	84.999.600	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Dinas Sosial	Jumlah Paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Dinas Sosial	Jumlah Paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	1 Paket	19.969.000	

1.06.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20 Dokumen	16.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20 Dokumen	15.960.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Sosial	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	240 Laporan	300.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Sosial	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	240 Laporan	297.536.000	
<b>1.06.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
1.06.01.1.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dinas Sosial	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	513.709.000	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Dinas Sosial	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0	0	
1.06.01.1.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Sosial	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 Unit	10.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Sosial	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0	0	
<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					

1.06.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Dinas Sosial	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Laporan	30.000.000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Dinas Sosial	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Laporan	30.000.000	
1.06.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Sosial	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	27 Laporan	20.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Sosial	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	27 Laporan	19.988.700	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dinas Sosial	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 Laporan	129.744.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dinas Sosial	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 Laporan	119.716.146	
<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>					
1.06.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Sosial	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit	100.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Sosial	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit	90.656.000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Sosial	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Sosial	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	105.480.000	

<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL</b>					<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>					
<b>1.06.02.2 .01</b>	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>					<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>					
1.06.02.2. 01.02	Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	Kab. Dairi	Jumlah keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan social kewenangan kabupaten/kota	40 Keluarga	100.000.000	Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	Kab. Dairi	Jumlah keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan social kewenangan kabupaten/kota	0	0	
<b>1.06.02.2 .03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</b>					<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</b>					
1.06.02.2. 03.02	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan social kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Dinas Sosial	Jumlah tenaga kesejahteraan social kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	15 Orang	150.000.000	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan social kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Dinas Sosial	Jumlah tenaga kesejahteraan social kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	15 Orang	148.953.000	
1.06.02.2. 03.03	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan social keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kab.Dairi	Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	50 Orang	150.000.000	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan social keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kab.Dairi	Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	0	0	

1.06.02.2.03.04	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan social kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kab.Dairi	Jumlah lembaga kesejahteraan social yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	15 Lembaga	300.000.000	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan social kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Kab.Dairi	Jumlah lembaga kesejahteraan social yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	15 Lembaga	299.999.000	
<b>1.06.04</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>					<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>					
1.06.04.2.01	<b>Rehabilitasi Social Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>					<b>Rehabilitasi Social Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>					
1.06.04.2.01.01	Pemyediaan Permakanan	Kab Dairi	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang		Pemyediaan Permakanan	Kab Dairi	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	46.411.400	

1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Kab Dairi	Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian Dan Kelengkapan Lainnya Yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang		Penyediaan Sandang	Kab Dairi	Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian Dan Kelengkapan Lainnya Yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	31.120.000	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Kab dairi	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewengan kabupaten/kota	50 orang	230.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kab dairi	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewengan kabupaten/kota	0	0	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kab dairi	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social kewengan kabupaten/kota	150 Orang	200.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kab dairi	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social kewengan kabupaten/kota	150 Orang	189.295.000	
1.06.04.2.01.07	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan kartu Identitas Anak	Kab dairi	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu indentitas anak bagi penyandang disabilitas kewengan kabupaten/ kota	20 Orang	50.000.000	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan kartu Identitas Anak	Kab dairi	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu indentitas anak bagi penyandang disabilitas kewengan kabupaten/ kota	0	0	

1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab dairi	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	20 Orang	50.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab dairi	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	25 Orang	235.800.270	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Kab dairi	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewengan kabupaten/kota	20 Orang	50.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab dairi	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewengan kabupaten/kota	20 Orang	39.505.000	
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>					<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>					
<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Kab dairi	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	Keluarga	500.000.000	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Kab dairi	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	Keluarga	202.059.000	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi bantuan social kesejahteraan keluarga	Kab dairi	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan social kesejahteraan keluarga kewengan kabupate/kota	750 Keluarga	1.000.000.000	Fasilitasi bantuan social kesejahteraan keluarga	Kab dairi	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan social kesejahteraan keluarga kewengan kabupate/kota	0	0	
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>					<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>					

<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota</b>					<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota</b>					
1.06.06.2.01.01	Penyediaan makanan	Kab. Dairi	Jumlah orang yang mendapatkan permakanaan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	100 Orang	100.000.000	Penyediaan makanan	Kab. Dairi	Jumlah orang yang mendapatkan permakanaan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	100 Orang	149.832.000	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Kab. Dairi	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten/kota	100 Orang	100.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Dairi	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten/kota	100 Orang	164.645.000	
<b>1.06.06.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>					<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>					

1.06.06.2.02.02	Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinas Sosial	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten /kota	22 Orang	200.000.000	Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinas Sosial	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten /kota	22 Orang	158.400.000	
<b>1.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>					<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>					
<b>1.06.07.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota</b>					<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota</b>					
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	TMP Panji Sibura-bura	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	1 Makam	100.000.000	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	TMP Panji Sibura-bura	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	0	0	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diperoleh melalui musyawarah pembangunan daerah Kabupaten Dairi yang dihadiri oleh kelompok masyarakat, kepala desa, ormas dan LSM.

Tabel 2.12.  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Kabupaten Dairi

No	Usulan	Volume / Satuan	Lokasi	Bidang Pembangunan			Perangkat Daerah Penanggung
				Infrastruktur	Ekonomi	Sosial Budaya	
1	-	-	-	-	-	-	-

## **BAB III**

### **Tujuan dan sasaran**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.**

visi Kementerian Sosial

Peran dan fungsi kementerian sosial adalah mewujudkan visi misi Presiden khususnya pada bidang sosial. visi Kementerian Sosial periode 2019-2024 adalah :

“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Visi ini mempunyai makna, bahwa Kementerian Sosial berkomitmen secara adil, professional, inovatif dan berintegrasi dalam menjalankan pembangunan nasional sesuai dengan visi Presiden dan wakil Presiden. Kemajuan dan kedaulatan bangsa tercermin dalam kemampuan bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.

Misi Kementerian Sosial

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. Misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. Misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
4. Misi nomor 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

## Tujuan Strategis Kementerian Sosial

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional. Tujuan strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

## Sasaran Strategis Kementerian Sosial

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial
4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

## Sinergisme Tujuan Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial

Sebagai SKPD yang mengurus bidang sosial pada tingkat Kabupaten, Dinas sosial kabupaten merupakan perpanjangan tangan Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial.

Tujuan Kementerian Sosial : Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan

Tujuan Dinas Sosial kab. Dairi : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

## **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

### **3.2.1. Tujuan**

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki titik kritis (critical point). Tujuan merupakan

dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja baik pada dampak, hasil maupun keluar dari suatu kegiatan, program dan sasaran.

**Tujuan** adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Perumusan tujuan dilakukan dengan pendalaman dan pengkajian terhadap masing-masing rumusan misi.

### **3.2.2. Sasaran**

**Sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat Daerah.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Dairi akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Perumusan tujuan strategis Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tujuan "Meningkatnya Kesejahteraan Sosial"

Sasaran "meningkatnya Keberdayaan Sosial"

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, Dinas Sosial Kabupaten Dairi menyusun program kegiatan Tahun 2023 seperti terlihat pada pada tabel di bawah ini.

### **3.3. Program Dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu dalam hal pembangunan daerah. Dinas Sosial Kabupaten Dairi menjalankan 1 urusan, yaitu Urusan Sosial merupakan urusan Wajib Pelayanan Dasar. Maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tahun 2023 terdiri dari:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2023			Sumber Dana
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>					
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>					APBD
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>					
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah</b>					
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		7 Laporan	10.000.000,-	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		21 Orang/bulan	2.417.042.989	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
	Penyediaan komponen Instalansi listrik/penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang Disediakan		2 Paket	11.082.500,-	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinas Sosial	2 Paket	84.999.600,-	
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Sosial	1 Paket	19,969.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Sosial	20 Dokumen	15,960,000	
	Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial	240 Laporan	297.536.000,-	

	<b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>					
	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Sosial	24 Laporan	30,000,000	
	Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	27 Laporan	19.988.700,-	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	6 Laporan	119.716,146	
	<b>Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan</b>					
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarka Pajak dan Perizinannya	Dinas Sosial	2 Unit	90.656,000	
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinas Sosial	2 Unit	105,480,000	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>					
	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>					
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah keluarga pada KAT yangmendapatkan fasilitas pemberdayan social kewengan Kabupaten/Kota	Kab. Dairi	40 Keluarga	0	
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		15 Orang	148,953,000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewengan Kabupaten/Kota.	Kab. Dairi	15 Lembaga	299.999.000,-	
<b>3</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>					

	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>					
	Penyediaan Makanan	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Kab. Dairi	50 Orang	46.411.400	
	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/kota	Kab. Dairi	50 Orang	31.120.000	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten /kota	Kab. Dairi	50 Orang	0	
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Dairi	150 Orang	189.295.000	
	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Indentitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewengan Kabupaten/Kota	Kab. Dairi	20 Orang	0	
	Pemberian Layanan kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Dairi	25 Orang	235800.270	
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota		20 Orang	39.505.000	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>					
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				202.059.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin		Keluarga	202.059.000	

		Kabupaten/Kota				
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		750 Keluarga	0	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>					
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>					
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)Kewenangan kabupaten/Kota	Kab. Dairi	100 Orang	149,832,000	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Dairi	100 Orang	164.645,000	
	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakatterhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>				158,400,000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	Dinas Sosial	22 org	158,400,000	
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>				<b>0</b>	
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>					
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	TMP Panji Sibura bura	1 Makam	0	

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Tabel 4.1  
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Dairi Tahun 2023  
Dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dan/ Pagu Indikatif
1					<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>							
1	06				<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>							
1	06	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>			<b>3.222.430.935</b>			<b>3.992.600.000</b>	
1	06	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah</b>			<b>10.000.000</b>			<b>26.000.000</b>	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	0	0		2 Dokumen	15.000.000.-	
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Laporan	10.000.000,-		7 Laporan	11,000,000	

1	06	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>2.417.042.989</b>			<b>2.500.000.000</b>
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dinas Sosial	21 Orang/bulan	2.417.042.989		21 Orang/bulan	2.500.000.000
1	06	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>429.547.100</b>			<b>501.600.000</b>
1	06	01	2.06	01	Penyediaan komponen Instalansi listrik/penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	2 Paket	11.082.500		2 Paket	22,000,000
1	06	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinas Sosial	2 Paket	84.999.600		2 Paket	88,000,000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Sosial	1 Paket	19.969.000		1 Paket	22,000,000
1	06	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinas Sosial	20 Dokumen	15.960.000		20 Dokumen	17,600,000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Sosial	240 Laporan	297.536.000		250 Laporan	352,000,000
1	06	01	1.07		<b>Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>				<b>0</b>			<b>120.000.000</b>
1	06	01	1.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Dinas Sosial	0	0			
1	06	01	1.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Sosial	0	0		10 unit	120.000.000
1	06	01	2.08		<b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>				<b>169.704.846</b>			<b>240.000.000</b>
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Sosial	24 Laporan	30,000,000		24 Laporan	50,000,000

1	06	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	27 Laporan	19.988.700		27 Laporan	50,000,000
1	06	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	6 Laporan	119.716.146		6 Laporan	140,000,000
1	06	01	2.09		<b>Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintahan</b>				<b>196.136.000</b>			<b>240.000.000</b>
1	06	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarka Pajak dan Perizinannya	Dinas Sosial	2 unit	90.656.000		2 unit	120,000,000
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Dinas Sosial	2 Unit	105.480.000		2 unit	120.000,000
1	06	02			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>				<b>448.952.000</b>			<b>775.000.000</b>
1	06	02	2.01		<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>				<b>0</b>			<b>120.000.000</b>
1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah keluarga pada KAT yangmendapatkan fasilitas pemberdayan social kewengan Kabupaten/Kota	Kab. Dairi	0	0		40 Keluarga	120.000,000
1	06	02	2.03		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>448.952.000</b>			<b>655.000.000</b>
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenagan Kabupaten/Kota		15 orang	148.953.000		15 orang	165,000,000
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewengan Kabupaten/Kota	Kab. Dairi	0	0		20 orang	170,000,000

1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota.	Kab. Dairi	2 Lembaga	299.999.000		2 Lembaga	320.000.000
1	06	04			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				<b>542.131.670</b>			<b>1.075.000.000</b>
1	06	04	2.01		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>				<b>542.171.670</b>			<b>1.075.000.000</b>
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Dairi	50 Org	46.411.400		50 Org	55.000.000
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang Yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Dairi	50 Org	31.120.000		50 Org	120.000.000
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten /kota	Kab. Dairi	0	0		60 orang	250,000,000
1	06	04	2.01	05	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Dairi	150 orang	189.295.000		200 orang	220,000,000
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Indentitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewengan Kabupaten/Kota	Kab. Dairi	0	0		25 Orang	55,000,000
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Dairi	25 Orang	235.800.270		25 Orang	320.000.000

1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Dairi	20 Orang	39.505.000		25 Orang	55.000.000
1	06	05			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>				<b>202.059.000</b>			<b>1.650.000.000</b>
1	06	05	2.02		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>202.059.000</b>			<b>1.650.000.000</b>
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Dairi	130.189 Keluarga	202.059.000		130.189 Keluarga	450.000.000,-
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Dairi	0	0		1000 Keluarga	1.200.000.000,-
1	06	06			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>				<b>472.877.000</b>			<b>520.000.000</b>
1	06	06	2.01		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>				<b>314.477.000</b>			<b>300.000.000</b>
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)Kewenangan kabupaten/Kota	Kab. Dairi	100 Orang	149.832.000		150 Orang	150.000.000
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Dairi	100 Orang	164.645.000		150 Orang	150,000,000
1	06	06	2.02		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>				<b>158.400.000</b>			<b>220.000.000</b>
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga	Dinas Sosial	22 Orang	158.400.000		22 Orang	220,000,000

					Bencana Kabupaten/Kota	Kewenangan						
1	06	07			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>						<b>120.000.000</b>	
1	06	07	2.01		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>						<b>120.000.000</b>	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	TMP Panji Sibur bura	0	0	1 Makam	120.000.000	
<b>Jumlah</b>											4.888.450.605	7.767.600.000



Sidikalang,  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN DAIRI

Anggara Ramces Sinurat, ST  
Pembina Tk. I

Nip. 19770323 200312 1 005

## Bab V

### PENUTUP

Dokumen Renja menjadi elemen penting dalam tahapan penyusunan dokumen perencanaan karena dokumen tersebut berisi tentang rencana kegiatan dan target yang ingin dicapai pada tahun berkenaan. Melihat pada sifatnya, Renja merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang bersifat operasional. Hal ini ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja output dan outcome dari setiap kegiatan. Selain itu juga memuat tentang Pagu Indikatif yang mungkin dapat disediakan untuk melaksanakan kegiatan.

Semoga Renja tahun 2023 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Dairi. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.

Sidikalang, 2022  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN DAIRI,  
  
ANGGARA RAMCES SINURAT, ST  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770323 200312 1 005